

TAJUK RENCANA

Menunggu Terobosan Para Menteri

DUA hari Presiden Jokowi berkeluh kesah, menegur kinerja para Menteri yang masih kurang serius menghadapi kondisi negara yang tidak normal. Dalam gestur yang jengkel, Presiden mengancam akan membubarkan Lembaga atau mengganti Menteri, jika tidak ada terobosan yang dilakukan.

Presiden menunjuk anggaran yang belum digunakan. Bahkan pada saat rapat terbatas, disinggung berbagai masalah yang muncul seperti penolakan warga untuk melakukan rapid test, atau pemaksaan pengambilan jenazah di rumah sakit di sejumlah daerah serta pemberian insentif atau juga keluarga korban Covid-19 yang diharapkan tidak berbelit.

Kegalauan Presiden sangat beresalan, karena realitas yang terjadi tersebut membuktikan masih ada yang belum selesai dikerjakan. Apalagi sebelumnya organisasi kesehatan dunia WHO telah meminta negara-negara mempersiapkan kemungkinan adanya gelombang ke dua Covid-19 yang dianggap akhir-akhir ini semakin cepat penularannya. Peringatan tersebut juga muncul dari sejumlah negara besar seperti Inggris, Australia dan Jerman. Australia malah mengerahkan militernya untuk ikut memperlancar rapid test bagi warganya, agar semuanya ikut berpartisipasi. Selain juga mengerahkan komunikasi untuk memberikan penjelasan tersebut. Kini sejumlah negara yang banyak warganya terkena, berusaha keras untuk mencegahnya.

Di sejumlah daerah di tanah air, badai virus Korona tersebut belum mereda. Di Jawa Timur misalnya angka yang terinfeksi justru melebihi DKI Jakarta. Di Jatim dinyatakan bukan hanya zona merah lagi, malah sudah hitam karena terlalu parahnya. Sehingga Presiden men 'deadline'

agar dalam 2 minggu Jatim sudah harus bisa menurunkan angka orang terinfeksi. Dan 2 hari kemudian Jatim menyatakan Madiun adalah zona hijau di Jawa Timur yang pertama.

Kesadaran warganya, kreativitas Pemerintah Daerah dan Pusat adalah kunci bagaimana untuk mencegah gelombang kedua badai Covid-19. Di Indonesia tentu menjadikan lebih berat, karena tak lama lagi akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah serempak. Bukan hanya persoalan sistem, namun dana untuk pelaksanaan Pilkada tentu tertekan karena konsentrasi ke penanganan Covid-19. Di DIY saja, Komisi pemilihan Umum (KPU) DIY sudah memprediksi kekurangan dana Rp 32,856 miliar. Jumlah tersebut untuk pelaksanaan Pilkada di Sleman, Bantul dan Gunungkidul (KR 30/6).

Pemerintah daerah memang harus kreatif, membaca apa yang terjadi di daerahnya. Kurang pemahamannya mengartikan maksud normal baru, bisa menjadi masalah termasuk di DIY. Bukan tidak mungkin, kurangnya pengetahuan di sejumlah daerah membuat masyarakat haus akan informasi. Tetapi membantainya informasi yang salah dan palsu sementara informasi yang simpang siur, membuat masyarakat salah mengakses, dampaknya seperti pukulan balik.

Seperti yang terjadi di DIY ketika diumumkan masa tanggap darurat diperpanjang, maka sejumlah masyarakat protes. Bahkan kalangan pariwisata mengagap akan berpengaruh terhadap imej pariwisata di DIY. Inilah pekerjaan yang belum selesai. Saran Presiden agar sosialisasi terus diperbanyak. Libatkan tokoh agama, masyarakat serta media ada benarnya. ***-a

Momentum Memperbaiki Kinerja Polri

Soeharno P Atmaja

DALAM rilis akhir tahun 2019, Polri memaparkan berbagai hasil survei. Berdasarkan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri 2019 berada di angka 72,1%. Tahun sebelumnya angkanya 87,8%. Artinya, survei LSI menunjukkan penurunan yang cukup tajam, yakni 15,7%. Sementara, survei Alvara Research 2019 menunjukkan angka kepuasan publik terhadap Polri 78,1%. Tahun sebelumnya, sedikit lebih tinggi mencapai 78,8%.

Itu hanyalah dua hasil survei dari berbagai survei. Dan posisi Polri masih sama dari tahun sebelumnya. Polri menempati posisi ketiga dalam tingkat kepercayaan masyarakat. Di bawah KPK dan TNI.

Namun di tengah pandemi Covid-19, berdasarkan survei Indikator Politik, yang dilakukan Mei 2020 terungkap 80,7% responden merasa puas atas kinerja Polri selama memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat. Apalagi dari segi keamanan, 72,6% cukup yakin dengan kinerja Polri. Disisi lain, penjiagaan dan edukasi kepada masyarakat soal bahaya virus Korona, melalui operasi ketupat lebaran selama 45 hari juga mendapat sambutan positif.



KR-JOKO SANTOSO

Sudah selayaknya tahun 2020 ini Polri memiliki komitmen, kesungguhan dan profesional, modern, dan terpercaya harus diwujudkan. Sementara, untuk menaikkan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara, harus mampu mengurangi bahkan meniadakan komplain pelayanan publik.

Disinilah peran humas diperlukan. Jaringan humas, baik di tingkat Mabes maupun di tingkat Polda harus proaktif. Dalam arti tidak hanya berfungsi sebagai juru bicara, tetapi harus lebih tanggap dalam mengelola isu. Pemilahan isu-isu harus jelas. Mana yang positif untuk Polri dan mana yang negatif. Dengan demikian Kadiv Humas Polri dan semua Kabid Humas Polda mampu meredam isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Cukup Berat
Tugas anggota Polri untuk mendapatkan simpati dan kepercayaan masyarakat sangat berat. Maka membangun komunikasi sangat diperlukan. Kini, masyarakat tidak hanya bergantung media massa cetak maupun elektronik untuk mengakses informasi namun juga media sosial. Ini menuntut para anggota polisi untuk kreatif dalam mengemas dan menyampaikan pesan kepada masyarakat.

Personel Polri harus pandai mengambil hati, mampu sebagai pemersatu dan penyelar. Dalam bertindak, segala sesuatu harus terukur. 74 tahun mengabdikan, semoga ke depan tidak ada lagi polisi dibenci. Yang ada polisi dicintai. □ - a

***H Soeharno Panca Atmaja SH, Anggota DPR-RI 2004-2009**

teknik untuk tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan. Setiap personel Polri harus mampu menjabarkan secara detail tugas pokoknya. Ini penting mengingat masih banyaknya tindakan pelanggaran perkara atau kasus di tingkat bawah yang sebenarnya masalah kecil bisa namun karena keliru penanganannya. Sehingga berakibat fatal 'mencoreng' citra institusi.

Untuk itu, sikap tanggap dan kemampuan personel terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat benar-benar diperlukan. Disisi lain perlunya merevaluasi program prioritas Kapolri, sejauhmana pelaksanaan di lapangan. Penguatan Polri yang promoter, yakni

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Jangan Maklum dengan Pikun

KITA seringkali mendengar kata pikun atau demensia. Bahkan kata-kata ini dituju pada orang lain yang seringkali lupa, meskipun tidak semua dari kita paham arti demensia. Pikun atau demensia adalah kemunduran kemampuan otak (kognitif) yang secara berangsur-angsur semakin parah akibat menuanya seseorang. Pikun disebabkan oleh adanya kerusakan sel-sel otak yang membuat kemampuan komunikasi antarsel menjadi terganggu.

Ciri-ciri orang yang sudah mengalami gejala demensia adalah menurunnya daya ingat/memori seseorang, sulitnya merangkai kata-kata menjadi suatu kalimat. Agak lama bila berbicara karena kalimatnya tersendat. Kemudian orang itu akan sangat lambat dalam mencari informasi yang tersimpan di pusat memorinya (*speed of information retrieval from memory*), sehingga lambat berkomunikasi. Adapun ciri lain dapat dikenali bila orang sudah mengalami kesulitan untuk fokus dan memberikan perhatian. Gangguan dalam menilai dan berargumentasi, disorientasi dan perubahan tingkah laku serta terganggunya persepsi visual. Juga jarang bersosialisasi, kurang minat melakukan hal yang dulu disenangi, dan sulit melakukan pekerjaan yang melibatkan pemikiran.

Proses seseorang menjadi pikun ini datangnya tidak secara tiba-tiba. Perubahan yang tidak kita harapkan ini disebabkan oleh matinya sel-sel otak, sedangkan kematian sel ini karena jarang digunakan. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang selalu belajar menambah ilmu meskipun usia semakin tua. Di samping melatih dan menjaga sel-sel otaknya tetap hidup, kemampuan ilmunya juga bertambah jadi tidak gampang pikun. Jika masih dalam kondisi normal, dalam arti kualitas kehidupan tidak terganggu dan masih beraktivitas

seperti biasa tidak mengapa, tapi akan lain artinya bila kepikunan sudah semakin parah. Orang sudah sering lupa dan sudah tidak mampu lagi mengingat seluruh peristiwa yang dialami, meskipun sudah dibantu dengan isyarat (*clue*) tetap tidak mendatangkan hasil. Artinya orang sudah pikun benar.

Sejatinya pikun bisa dicegah sejak dini. Menurut penelitian para ahli, dengan melibatkan sel-sel saraf ujung jari secara langsung dapat merangsang otak. Misal memaknai sumpit, merajut, mengisi teka teki silang, catur atau bermain pensil di antara jemari kita akan membantu otak dengan meningkatkan peredaran darah. Kombinasi strategi dan memori permainan bridge bisa menantang otak untuk mempelajari informasi baru, sehingga sel-sel otak terlatih untuk berfikir. Tentunya diimbangi juga dengan kegiatan fisik seperti olahraga dan senam ringan. Maka, tidak ada kata terlambat, mulailah dari sekarang untuk selalu melatih sel-sel otak kita agar tetap terjaga. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh internasional seperti Gladstone yang memimpin kabinet Inggris di usia 80 tahun, Galileo yang menemukan ilmu gaya gerak dalam usia 70 tahun, James Watt ahli ilmu alam Inggris yang mempelajari Bahasa Jerman saat usianya 85 tahun, dan Bertrand Ruessel pada usia 94 tahun masih aktif sebagai tokoh penggerak perdamaian internasional.

Mari kita berdayakan semaksimal mungkin apa yang diberikan Allah SWT kepada kita. Banyak manusia berkarya besar bukan pada usia produktifnya melainkan pada masa tuanya. Dengan keterbatasan fisik di masa tua, mereka tetap bisa berkarya. Jangan maklum dengan pikun. □ - a

Nur Rahmah Irdianawati SE Staff Sub Bag Keuangan RSUD Sleman.

Relevansi Batas Usia PPDB

Nurul Lathiffah

ADA fenomena yang secara berulang terjadi, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya di tingkat SD, yakni protes orangtua terhadap batas usia anak. Dalam pasal 5 Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 disebutkan, anak dapat mendaftar SD jika berusia 7-12 tahun, dengan usia paling rendah adalah 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan. Sayangnya, tidak mudah bagi anak berusia 6 tahun untuk menembus PPDB SD. Realita ini memunculkan ketakutan orangtua yang melahirkan anaknya dengan rentang waktu jauh dari bulan Juli.

Regulasi penerimaan siswa SD dan sederajat harus berusia minimal 7 tahun memiliki dasar yang kuat. Psikolog perkembangan Piaget menyebutkan, usia 7 tahun merupakan fase operasional konkret, di mana anak mulai menunjukkan kemampuan penyelesaian masalah secara konkret, mulai memahami hubungan, dan sadar akan sudut pandang orang. Usia 7 tahun diyakini sebagai usia yang matang untuk belajar membaca, menulis dan berhitung (calistung) dan menemuph pendidikan dasar. Apabila usia sebagai indikator utama dalam penerimaan siswa berpijak pada dasar teori yang telah teruji dan valid, maka semua pihak perlu bisa memahami dan mengerti.

Masih Relevan?
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah teori perkembangan Piaget masih relevan dan tidak perlu disandingkan dengan teori mutakhir lainnya? Dengan kata lain, apakah batas usia 7 tahun diterima di SD tidak perlu dikaji ulang?

Erikson dalam teori tahapan perkembangan mengemukakan, usia sekolah (dasar) pada rentang 6-12 tahun. Pada usia 6 tahun diharapkan anak

mulai menciptakan, mengembangkan, dan memanipulasi sesuatu, mengembangkan kompetensi, dan ketekunan. Kabar baiknya, kesiapan anak untuk menjadi siswa sekolah dasar bukan ibarat jauh panggang dari api.

Pakar pendidikan Montessori mengemukakan, anak usia dini memiliki kemampuan 'menyerap' berbagai informasi. Montessori juga membangun model bahwa pengajaran yang pernah diwacanakan dilarang di PAUD (termasuk di dalamnya ada TK) dan baru boleh diselenggarakan di SD tidak selamanya benar. Dengan kemampuan 'menyerap', Montessori berpendapat bahwa calistung dapat diajarkan sejak dini dalam iklim kelas yang ceria dan happy.

Siap Sekolah
Usia (saja) sebenarnya tidak bisa untuk dijadikan dasar penerimaan siswa. Terdapat aspek-aspek lain dari kesiapan sekolah yang juga penting dipertimbangkan orangtua dan sekolah yang hendak dituju. Atas inisiatif pribadi atau institusi, orangtua atau sekolah telah memberlakukan tes kesiapan sekolah bagi calon siswa SD. *Nijmeegse Schoolbekwaamheids Test* (NST) merupakan salah satu alternatif tes kesiapan sekolah yang lazim digunakan.

Keputusan memilih SD bagi anak bukan merupakan hal sepele. Apabila anak belum siap sekolah, dan orangtua bersikeras menyekolahkan anak ke SD, maka akan ada konsekuensi negatif yang harus diterima. Tanpa kesiapan sekolah, anak bisa mengalami ketidaksiapan yang ber-

dampak buruk secara berkesinambungan. Perlu *rembug* ulang pemangku kebijakan. Apabila tes kesiapan sekolah dapat menjadi faktor prediktif kesiapan sekolah yang dapat menunjang kesuksesan anak, mestinya tes kesiapan sekolah bisa diakses secara inklusif.

Tes kesiapan sekolah yang masih eksklusif - karena mahal - sering dihindari orangtua atau pun sekolah. Padahal, tes ini dapat menjadi awal penentuan, apakah anak akan siap berlanjut ke SD atau masih perlu meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik, afektif, dan sosio emosi di PAUD. Sudah saatnya, usia saja bukan menjadi penentu tunggal penerimaan siswa. Kesiapan sekolah pada anak merupakan penentu yang sudah seharusnya dijadikan pijakan pengambilan keputusan. □ - a

***Nurul Lathiffah SPsi, pemerhati pendidikan, Mahasiswa Program Magister Psikologi Sains UMB Yogyakarta**

Pojok KR

KPU DIY lapor, pelaksanaan Pilkada di 3 kabupaten kurang dana Rp 32, 856 miliar.
*** Ada yang masih bisa dihemat?**

Presiden minta, Menteri harus kreatif. Jangan anggap ini normal.
*** Ditantung Presiden, kita tunggu terobosannya.**

2 hari Parangtritis dikunjungi 18.000 wisatawan.
*** Asal tetap jaga kesehatan, jangan sampai ada klaster baru.**

Beraba

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Samarang: Jalan Lempersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu' Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluar...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.